

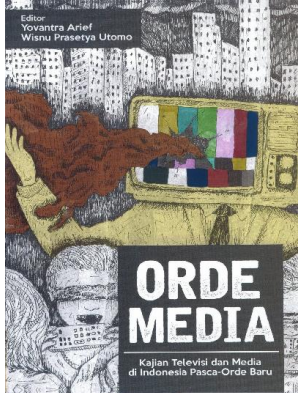
Tinjauan Pustaka:

TELEVISI DAN MASYARAKAT DALAM ORDE MEDIA

Fathimah Fildzah Izzati

Pusat Penelitian Politik - LIPI

Fukdzah.izzati@gmail.com



- Judul Buku : Orde Media: Kajian Televisi dan Media di Indonesia Pasca-Orde Baru
- Editor : Yovantra Arief & Wisnu Prasetyo Utomo
- Penerbit : Insist Press, Yogyakarta
- Tahun Terbit : 2015
- Jumlah Hlm. : vii+295 halaman

Pendahuluan

Hiruk pikuk pembicaraan seputar Pemilihan Presiden (Pilpres) yang cukup fenomenal pada tahun 2014 lalu mengingatkan kita pada peran media yang begitu signifikan dalam mempengaruhi serta membentuk persepsi dan opini masyarakat. Peran signifikan tersebut, salah satunya dapat dengan mudah ditemukan pada waktu itu melalui pemberitaan dua stasiun televisi swasta yang secara jelas menunjukkan keberpihakan mereka terhadap masing-masing pasangan Calon Presiden - Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres)—*Metro TV* kepada Jokowi-JK dan *TV One* kepada Prabowo-Hatta. Fenomena ini kemudian memantik banyak perbincangan di khalayak ramai. Hal itu dapat kita temui misalnya dalam berbagai *platform* media sosial, seperti *facebook* atau *twitter*. Pada momen debat kandidat Capres-Cawapres misalnya, kita melihat beragam *live tweet* hasil pengamatan tayangan debat di televisi melalui *twitter* dengan beragam *hashtag* yang mengikutinya.

Pertanyaan mengenai hubungan antara media dan politik pun bermunculan. Kesalingterkaitan hubungan antara media dan politik, serta bagaimana media membentuk perspektif dan opini

masyarakat memang penting untuk diteliti. Terlebih, hubungan yang kuat di antara media dan politik ditunjukkan secara vulgar di televisi, yang mengisi hampir sebagian besar ruang keluarga Indonesia. Sebagai pengantar, buku *Orde Media: Kajian Televisi dan Media di Indonesia Pasca-Orde Baru* yang berisi kumpulan artikel yang pernah dimuat di *website Remotivi* (<http://www.remotivi.or.id>) ini menghadirkan beragam kajian dan analisis mengenai hal tersebut. Mulai dari jurnalisme dalam televisi, kajian di balik tayangan-tayangan televisi, hingga persoalan literasi media yang hingga kini masih menjadi problem yang cukup serius di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam tinjauan atas buku ini, saya membagi tulisan menjadi tiga bagian, yaitu *Jurnalisme Televisi: dari Serikat hingga Independensi*, *Televisi dan Pelanggaran Konstruksi Sosial dalam Masyarakat*, dan *Membaca Televisi dan Problem Literasi Media di Indonesia*. Sebelumnya, kajian mengenai media penyiaran (termasuk di dalamnya televisi) dan hubungannya dengan politik di Indonesia telah pula ditulis, misalnya oleh Puji Rianto, dkk dalam buku *Kepemilikan dan Intervensi Siaran: Perampasan Hak Publik, Dominasi, dan Bahaya*

Media di Tangan Segelintir Orang.¹ Dalam buku tersebut, perspektif ekonomi politik yang digunakan untuk menganalisis jauh lebih kuat dan menonjol dibandingkan dengan yang ditunjukkan dalam buku yang ditinjau ini.

Jurnalisme Televisi: dari Serikat hingga Independensi

Bagian awal buku setebal 295 halaman ini menitikberatkan pembahasan pada kajian seputar jurnalisme televisi. Dalam buku ini, hubungan antara posisi jurnalis sebagai pekerja media, kepemilikan media serta independensi jurnalis menjadi sorotan utama. Ada dua problem utama dalam jurnalisme televisi yang dibahas pada bagian ini. *Pertama*, sikap/keberpihakan jurnalis, termasuk di dalamnya profesionalisme dan independensi jurnalis. *Kedua*, persoalan serikat pekerja media dan opini yang dibentuk media mengenai serikat pekerja/serikat buruh secara umum.

Sikap/keberpihakan jurnalis² televisi yang ditunjukkan pada saat ini, tidak lepas dari pengaruh konteks sejarah yang melatarinya.³ Ini dapat dilihat dalam artikel Roy Thaniago yang berjudul “Jurnalisme Televisi dan Heroisme Simalabim”. Dalam artikel ini terlihat bahwa keberpihakan jurnalis televisi sedikit banyak telah ditunjukkan pada awal kemunculan televisi swasta di Indonesia pada tahun 1990-an. Pada masa itu, jurnalisme televisi swasta menunjukkan posisi mereka yang sedikit banyak mengkritik Orde Baru, sebagaimana ditunjukkan oleh Rajawali

Citra Televisi (RCTI)⁴ dan (SCTV)⁵ (hlm. 20-23). Hal itu dapat dilihat pada upaya kedua stasiun televisi tersebut dalam menyajikan pemberitaan di luar format *straight news*⁶ sebagaimana diberlakukan pada masa itu (hlm. 23). Bahkan, pengelola RCTI misalnya juga menyiapkan perusahaan lain (PT. Sindo) sebagai antisipasi jika RCTI terkena masalah akibat pemberitaan (hlm. 23). Hanya saja, keberpihakan jurnalis televisi pada masa itu tidak dapat ditunjukkan lebih jauh karena analisis terhadap artikel-artikel berita yang ditulis para jurnalis pada waktu itu belum memadai (hlm. 23-26).

Kemudian, persoalan independensi jurnalis saat ini dikupas melalui apa yang terjadi pada masa Pilpres tahun 2014 lalu. Dalam artikel Indah Wulandari “Panggil Aku Wartawan”, terlihat bahwa kepentingan politik pemilik media sangat mendominasi kinerja jurnalis pada pemilu 2014 yang lalu. Kasus yang menimpa redaktur RCTI, Raymond Araian Rondonuwu menjadi contoh

⁴Dalam sebuah wawancara dengan Chrys Kelana, Bambang Trihatmojo (anak dari Soeharto) menyatakan bahwa konsep “Seputar Indonesia”, salah satu program berita di RCTI, harus diubah. (Lihat Ishadi SK, *Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2014) hlm. 155). RCTI sendiri merupakan televisi komersial pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 24 Agustus 1989 (Lihat Rianto, Puji, dkk., *Kepemilikan dan Intervensi Siaran: Perampasan Hak Publik, Dominasi, dan Bahaya Media di Tangan Segelintir Orang*, (Yogyakarta: Yayasan TIFA dan PR2Media, 2014), hlm. 9).

⁵Salah satu kasus yang terkenal ialah kasus “cabut gigi” pada tanggal 17 Mei 1998. Pada saat itu, penyiar SCTV, Ira Koesno, mewawancarai tokoh Golkar, Sarwono Kusumaatmadja, yang menyarankan agar Soeharto mengundurkan diri, dengan mengganti istilah pengunduran diri tersebut dengan istilah “Cabut Gigi”. (Lihat *Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto*, Ishadi SK, (2014), Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, hlm. 158-159). SCTV (Surya Citra Televisi) berdiri tidak lama setelah RCTI berdiri yang kemudian diikuti dengan berdirinya beberapa stasiun televisi swasta lainnya (Lihat Rianto, Puji, dkk., *Kepemilikan dan Intervensi Siaran: Perampasan Hak Publik, Dominasi, dan Bahaya Media di Tangan Segelintir Orang*, (Yogyakarta: Yayasan TIFA dan PR2Media, 2014), hlm. 9).

⁶Pada masa itu, Departemen Penerangan RI melarang televisi swasta untuk memproduksi berita yang termasuk ke dalam kategori berita hangat (*hard news*). Untuk menyiasatinya, stasiun televisi swasta seperti RCTI mengemas program berita yang berisi berita-berita ringan (*soft news*). (Lihat *Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto*, Ishadi SK, (2014), Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, hlm. 80-81).

¹Lihat Puji Rianto, dkk. *Kepemilikan dan Intervensi Siaran: Perampasan Hak Publik, Dominasi, dan Bahaya Media di Tangan Segelintir Orang* (Yogyakarta: Yayasan TIFA dan PR2Media, 2014).

²Sikap/keberpihakan jurnalis terkait dengan kode etik jurnalis yang penting untuk senantiasa dijaga mengingat salah satu kewajiban utama jurnalisme ialah untuk menemukan atau mencari kebenaran serta memelihara akal sehat. (Lihat Puji Rianto, dkk., *Kepemilikan dan Intervensi Siaran: Perampasan Hak Publik, Dominasi, dan Bahaya Media di Tangan Segelintir Orang*, (Yogyakarta: Yayasan TIFA dan PR2Media, 2014), hlm. 136).

³Dalam hal ini, kerangka besar perjalanan jurnalisme di Indonesia termasuk hubungannya dengan negara dan situasi/kondisi ekonomi politik dapat dilihat dalam Daniel Dhakidae, “The State, The Rise of Capital and The Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesian News Industry”, Disertasi Doktorat, Amerika Serikat, Cornell University, 1991, hlm. 1-549.

yang menunjukkan bahwa independensi jurnalis ada di antara kepentingan politik pemilik media dan etika jurnalistik yang melekat pada profesionalisme jurnalis (hlm. 33-46). Tantangan yang besar ini tidak saja datang dari pemilik media tetapi juga sesama jurnalis dengan posisi yang lebih strategis dan dekat kepentingannya dengan pemilik media (hlm. 36-45). Meski demikian, artikel ini tidak menjelaskan bagaimana seharusnya jurnalis menempatkan keberpihakannya tanpa mengabaikan etika profesionalnya sebagai jurnalis. Problem independensi jurnalis memang selalu berkait erat dengan situasi ekonomi politik yang melingkupinya, tidak terkecuali persoalan kepemilikan media itu sendiri. Namun demikian, saya setuju dengan Gallagher bahwa visi jurnalisisme hanya dapat diraih oleh jurnalis yang memiliki independensi.⁷

Di sisi lain, serikat pekerja media muncul sebagai solusi demi menghadapi berbagai tantangan dalam dunia jurnalistik. Dalam artikel “Serikat Pekerja, Kekerasan Simbolik, dan Propek Masa Depan”, Satrio Arismunandar menjelaskan bahwa kebebasan pers akan terjamin jika para jurnalisnya berserikat (hlm. 67). Namun demikian, berdasarkan data yang ada, perkembangan serikat pekerja media atau serikat jurnalis di Indonesia tidak menunjukkan hasil yang signifikan (hlm. 68). Selain sangat berpusat di Pulau Jawa (68% serikat pekerja media berada di Pulau Jawa), pertumbuhannya pun sangat kecil, yakni hanya sekitar satu serikat pekerja media yang bertambah setiap tahunnya (hlm. 68). Salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan serikat pekerja media, sebagaimana diulas oleh Arismunandar, ialah karena para jurnalis kebanyakan masih merasa bahwa mereka bukanlah bagian dari kelas pekerja sebagaimana buruh pabrik, pekerja bangunan, dan sebagainya

⁷Lihat Puji Rianto, dkk., *Kepemilikan dan Intervensi Siaran: Perampasan Hak Publik, Dominasi, dan Bahaya Media di Tangan Segelintir Orang*, (Yogyakarta: Yayasan TIFA dan PR2Media, 2014), hlm. 149. Selain itu, Mengenai konsep independensi jurnalis, khususnya jurnalis media cetak di Indonesia dari masa ke masa, dapat dilihat di antaranya dalam Mochamad Ikhsan Rizal Assalam. “Independensi Jurnalis dan Konstruksi Jurnalisisme Profesional dalam Konteks Pers Industrial di Indonesia Pasca-Orde Baru: Studi Kasus Pemberitaan Pemilu 2014 di *Media Indonesia* dan *Koran Sindo*”, Skripsi Sarjana, Indonesia, Universitas Indonesia, 2016, hlm. 1-165.

(hlm. 69-70). Sayangnya, artikel Arismunandar tidak membahas lebih jauh persoalan ini, mengapa kesadaran jurnalis sebagai “kaum profesional”⁸ tersebut bisa timbul, serta proses kerja seperti apa yang menghasilkan kesadaran sedemikian.

Ironisnya, kesadaran jurnalis secara umum sebagaimana gambaran Arismunandar tersebut kerap kali sejalan dengan pemberitaan yang mereka hasilkan mengenai kaum buruh dan serikat buruh. Setidaknya, sejak 2012 yang lalu, sebagaimana ditulis Azhar Irfansyah dalam “Rutinitas Berita dan Sinisme terhadap Buruh”, berita-berita dengan nada sinis terhadap kaum buruh dan gerakan serikat buruh muncul dan menjadi *framing* tersendiri di media (hlm. 61-65). Para jurnalis seperti berjamaah membuat pemberitaan sinis yang memojokkan posisi kaum buruh. Sinisme ini di antaranya ditunjukkan dalam berbagai berita mengenai aksi buruh dalam menuntut kenaikan upah, aksi hari buruh internasional, hingga aksi-aksi mogok kaum buruh (hlm. 62-63). Dalam artikelnya ini, Irfansyah menganalisis bahwa kesadaran para jurnalis/wartawan yang lebih menghayati posisinya sebagai bagian di luar kelas pekerja menjadi faktor pendukung munculnya sinisme tersebut (hlm. 64).

Televisi dan Pelanggengan Konstruksi Sosial dalam Masyarakat

Pada bagian berikutnya, buku berisi 38 artikel pendek ini menyoroti problem yang merupakan bagian dari dampak yang memiliki keterhubungan yang erat dengan masalah sebelumnya. Berbagai artikel yang disajikan para penulis pada bagian bertajuk “Teks” ini menyoroti berbagai tayangan televisi Indonesia yang melanggengkan, membentuk, dan mereproduksi konstruksi sosial atas berbagai hal dalam masyarakat. Tayangan-tayangan seperti *Kick Andy*, *Jika Aku Menjadi*, *Indonesia Lawyers Club*, *Kakek-Kakek Ngeres*, hingga *Inspirasi Iman*,

⁸Mengenai konsep profesionalisme jurnalis, khususnya media cetak di Indonesia dari masa ke masa, dapat dilihat di antaranya dalam Mochamad Ikhsan Rizal Assalam. “Independensi Jurnalis dan Konstruksi Jurnalisisme Profesional dalam Konteks Pers Industrial di Indonesia Pasca-Orde Baru: Studi Kasus Pemberitaan Pemilu 2014 di *Media Indonesia* dan *Koran Sindo*”, Skripsi Sarjana, Indonesia, Universitas Indonesia, 2016, hlm. 1-165.

menjadi sorotan dan dibahas dengan analisis kritis yang tajam.

Sebagaimana diketahui, saat ini kehidupan keseharian masyarakat, terutama di perkotaan, semakin disesaki dengan individualisme. Indikatornya dapat kita temukan dengan mudah, seperti langkanya forum-forum diskusi warga yang membicarakan persoalan-persoalan *neighborhood* di lingkungan tempat tinggal kita. Terlebih, kehidupan sosial pun kemudian dikanalkan ke dalam sebuah kotak bernama televisi.⁹ Semua urusan dan permasalahan yang berada dalam domain publik, seperti keadaan politik nasional seolah mampu diatasi dengan hanya dibahas dalam berbagai diskusi interaktif di televisi.

Dengan menonton debat—yang lebih sering menjurus pada debat kusir—para tokoh masyarakat di *Indonesia Lawyers Club* misalnya, para penonton merasa sudah menjadi bagian dan bisa terlibat dalam perdebatan politik terkini (hlm. 102-107). Di sisi lain, sebagaimana dinyatakan Kunto Adi Wibowo dalam “*Indonesia Lawyers Club: Kolonisasi Logika Televisi dalam Logika Politik*”, tayangan seperti *Indonesia Lawyers Club* juga berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi politik yang ditampilkan dalam debat-debat tersebut seperti halnya informasi hiburan (*infotainment*) atau sinetron (hlm. 107).

Selain kondisi politik nasional, proses kerja yang bersifat politik juga justru malah digambarkan dalam berbagai sinetron sebagai sesuatu yang instan, anakronistis, dan sama sekali tidak mengandung dimensi sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Roy Thaniago dan Berto Tukan dalam “Takdir di Atas Kerja” (hlm. 184-195). Di sisi lain, persoalan yang lokus utamanya berada dalam domain personal seperti keimanan dan religiusitas diproblematikasikan melalui frekuensi

milik publik,¹⁰ sebagaimana disajikan dalam tayangan *Inspirasi Iman* (hlm. 131-135). Lebih jauh, dalam artikel berjudul “Komoditas Syariah di Layar Kaca”, Yovantra Arief menggugat *Inspirasi Iman* yang banyak menyajikan sesat pikir terutama mengenai hubungan antara kapitalisme dan agama (hlm. 131-138).

Dorongan-dorongan untuk menyalurkan hasrat berkolektif, seperti berempati dan berbuat baik kepada sesama juga disalurkan melalui tontotan yang banyak menyuguhkan penderitaan sesama dan tentunya menguras air mata, seperti *Kick Andy* dan *Jika Aku Menjadi*. Ambar Arum dalam artikelnya yang berjudul “Ada Untung di Balik Tangisan”, menggambarkan bahwa tayangan *Jika Aku Menjadi* telah membentuk citra orang miskin sedemikian rupa hingga perlu dikasihani dan disesali keberadaannya dengan tangisan (hlm. 77). Dengan menonton tayangan *Jika Aku Menjadi* misalnya, para penonton dibuat seolah sudah memiliki empati dan jiwa sosial yang cukup memadai untuk kemudian bersyukur tidak mengalami hal sedemikian sebagaimana ditayangkan (hlm. 76-79). Sementara itu, dengan menonton *Kick Andy*, perjuangan hidup-mati seseorang dapat dijadikan inspirasi bagi para penontonnya tanpa berusaha menunjukkan problem sesungguhnya di balik fenomena yang ditampilkan (hlm. 83-85).

Secara makna, kedua tayangan tersebut sebenarnya menyajikan hal yang tidak jauh berbeda. Kedua tayangan tersebut menyajikan potret kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial yang dialami masyarakat kebanyakan setiap harinya. Hanya saja, kedua tayangan tersebut menghilangkan dimensi struktural yang menjadi penyebab dari kemiskinan dan ketidakadilan tersebut. Kedua tayangan tersebut hendak membentuk, melanggengkan serta mereproduksi pemahaman dalam masyarakat bahwa persoalan-persoalan seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial tidak dikondisikan dan tidak ada hubungannya dengan struktur ekonomi politik yang lebih besar, sebagaimana diuraikan Windu

⁹Data dari Media Scene (2011) menyebutkan bahwa televisi telah menjangkau sekitar 78 % penduduk, dimana penduduk yang memiliki akses terhadap lembaga penyiaran swasta berjumlah 67 % atau sekitar 122 juta penduduk. Isi televisi swasta sendiri lebih banyak ditujukan untuk penduduk urban serta bersifat sangat seragam dan elitis. Lihat Puji Rianto, dkk., *Kepemilikan dan Intervensi Siaran: Perampasan Hak Publik, Dominasi, dan Bahaya Media di Tangan Segelintir Orang* (Yogyakarta: Yayasan TIFA dan PR2Media, 2014), hlm. xiv.

¹⁰Dalam artikel Berto Tukan “Polusi Bisnis di Udara Indonesia” (hlm. 234-240) dijelaskan bahwa frekuensi dimiliki oleh publik seperti halnya air, tanah dan udara dan dikelola oleh negara untuk kesejahteraan bersama (lihat Yovantra Arief dan Wisnu Prasetyo Utomo (ed.). *Orde Media: Kajian Televisi dan Media di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Yogyakarta: Insist Press, 2015), hlm. 235).

Jusuf dalam artikelnya “Delusi *Kick Andy*” (hlm. 84-85). Lebih jauh, tayangan *Kick Andy* dapat membuat para penikmatnya melupakan persoalan-persoalan politik yang lebih mendesak daripada apa yang disodorkan dalam *Kick Andy* (hlm. 85). Pembentukan citra masyarakat miskin sebagai masyarakat yang perlu dikasihani, ditangisi, dan diberi derma (hlm. 76-79), alih-alih diberdayakan dan diinklusiikan dalam proses politik, juga ditampilkan secara vulgar dalam kedua tayangan tersebut.

Di sisi lain, konstruksi sosial atas perempuan yang terus bertahan hingga saat ini sebagai objek seksual laki-laki juga turut dilanggengkan secara vulgar oleh tayangan semacam *Kakek-Kakek Narsis*.¹¹ Dalam artikel berjudul “KKN atawa Kakek-Kakek Ngeres”, Veven SP Wardhana menguraikan bahwa stereotip terhadap perempuan sebagai makhluk pasif yang hanya mengandalkan kecantikan tanpa butuh kecerdasan direproduksi secara terus-menerus melalui berbagai adegan serta dialog dalam tayangan tersebut (hlm. 119). Selain itu, kebertubuhan perempuan pun dilecehkan melalui berbagai tayangan “komedi” seperti *Opera Van Java* (OVJ) dan *Extravaganza*. Acep Iwan Saidi menaruh perhatian khusus terhadap hal ini melalui artikelnya yang berjudul “Komedi Televisi dan Asosiasi yang Didangkalkan”. Dalam artikel tersebut, Saidi mengemukakan bahwa tubuh yang pada umumnya selalu mengalami pelecehan (penertawaan) ialah tubuh yang “memperempuan” serta tubuh yang dianggap jelek (hlm. 125). Sementara itu, dalam tayangan lainnya, seperti *Extravaganza*, sifat keperempuanan (feminin) dan tubuh perempuan bahkan dijadikan bahan lawakan (hlm. 126).

Munculnya beragam tayangan yang bermasalah sebagaimana paparan di atas, tak dapat dipungkiri juga merupakan konsekuensi dari masih lemahnya *media watch* atau pengawasan publik atas tayangan/isi media penyiaran, termasuk televisi. Selain itu, masih lemahnya

¹¹Tayangan *Kakek-Kakek Narsis* ini pernah digugat oleh Remotivi bersama Komnas Perempuan karena dianggap sebagai tayangan yang melecehkan martabat perempuan (lihat Lihat Intan Poerwaningtias, dkk. *Model-Model Gerakan Literasi Media dan Pemantauan Media di Indonesia*. Yogyakarta: PKMBP dan Yayasan TIFA, 2013), hlm. 61-62.

literasi media di masyarakat pun memungkinkan tayangan-tayangan semacam itu terus direproduksi. Oleh karena itu, penting untuk menyoroti persoalan pengawasan media (*media watch*) serta literasi media yang saling berkelindan, sebagaimana akan dipaparkan pada bagian selanjutnya.

Membaca Televisi dan Problem Literasi Media di Indonesia

Jika berbagai tayangan televisi dianalogikan sebagai sebuah “teks” maka, “konteks” atas “teks” tersebut tentunya penting untuk dijelaskan lebih lanjut. Sebagai sebuah “teks”, televisi dapat “dibaca” dan dikritisi, sebagaimana buku atau teks-teks lain pada umumnya (hlm. 212). Problemnya, tidak semua orang bisa “membaca” apalagi “mengkritisi” tayangan/isi televisi. Disitulah penting kemudian membicarakan literasi media¹² sebagai konteks dari pembacaan atas hal tersebut.

Dalam sejarahnya, televisi selalu terkait erat dengan persoalan kepemilikan dan relasi kuasa, sehingga persoalan “membaca televisi” pun menjadi tidak lagi sederhana. Orde Baru, harus diakui, banyak mempengaruhi dunia pertelevisian Indonesia saat ini. Melalui artikelnya yang berjudul “Masyarakat Pascakolonial dan Pengelolaan TV ala Orde Baru”, Holy Rafika membahas persoalan tersebut. Warisan Orde Baru yang memperlakukan televisi sebagai tontonan semata terus tertinggal dan bertahan hingga saat ini (hlm. 210-212). Para pemirsa atau penonton televisi dikonstruksikan sebagai pihak yang pasif penerima tayangan televisi sebagaimana adanya sehingga televisi benar-benar diperlakukan sebagai media tontonan yang tidak bisa dibaca apalagi dikritisi (hlm. 212). Implikasinya, para penonton atau masyarakat luas terus dianggap sebagai pihak yang irasional sehingga “layak” mengonsumsi isi tayangan televisi yang terus

¹²Menurut *National Association for Media Literacy Education* (NAMLE), literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan serta bertindak dengan menggunakan semua bentuk komunikasi. Terkait itu, literasi media memberdayakan masyarakat untuk menjadi pemikir dan pencipta yang kritis, menjadi komunikator yang efektif dan warga negara yang aktif. Lihat situs resmi NAMLE <https://namle.net/publications/media-literacy-definitions/>; internet; diakses pada tanggal 8 April 2016.

dibuat sesuai kehendak pemiliknya semata (hlm. 212).

Selain kontrol penguasa, Fandy Hutari yang melakukan tinjauan terhadap buku Garin Nugroho *Kekuasaan dan Hiburan* dalam artikelnya berjudul “Kala Televisi Dikuasai Rating dan Penguasa”, menyebut *rating* sebagai hal lain yang menjadi penentu dari sebuah produksi tayangan televisi (hlm. 203--205). *Rating* seringkali menjadi panglima dalam pengambilan keputusan di mana pada saat yang bersamaan juga mengabaikan kualitas tontonan, baik dari segi estetika, sosial, maupun psikologis (hlm. 204). Pada titik tertentu, *rating* bahkan dapat membentuk wajah atau isi dari sebuah tayangan televisi itu sendiri (hlm. 204). Hal ini tidaklah mengherankan, mengingat pada mulanya, televisi dibuat memang untuk kepentingan bisnis atau akumulasi kapital (hlm. 214).

Kemudian, dalam artikel yang berjudul “Membaca Gerak Industri Televisi”, Wisnu Prasetya Utomo menyatakan bahwa semangat pendirian televisi sejak awal bukanlah ditujukan untuk dijadikan sebagai institusi sosial sebagaimana semangat pendirian awal media cetak. Namun, lebih kepada semangat untuk menjadikan televisi sebagai institusi bisnis yang menarik keuntungan dalam jumlah yang sangat besar (hlm. 214). Hal ini pun menjadi konteks dari kemunculan televisi sebagai media komersial di mana gerak industri televisi sebagai media komersial ini, sebagaimana diungkap Utomo, dapat dibaca melalui tiga hal, yakni komodifikasi, spesialisasi, dan strukturisasi (hlm. 215). Tidak cukup dengan tayangan-tayangan yang dibuat dan dipertahankan *based on rating* atau tayangan-tayangan seputar Jakarta-sentris (hlm. 253), televisi pun menyajikan apa yang menjadi jantungnya, setiap saat, yakni iklan.¹³ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Remotivi*, kini

¹³Iklan komersial bertujuan tidak saja untuk meningkatkan penjualan secara cepat, tapi juga untuk menciptakan keinginan di benak publik dalam jangka panjang mengenai suatu hal/suatu produk. (lihat Torben Vestergaard dan Kim Schroder. *The Language of Advertising* (Oxford: Blackwell, 1989), hlm. 1). Dengan kata lain, melalui iklan, konsumsi mengambil sebuah corak budaya yang jelas (Lihat Stuart Ewen “Advertising as Social Production”, dalam Armand Mattelart dan Seth Siegelaub (eds.), *Communication and Class Struggle: 1. Capitalism, Imperialism*, (New York: I.G. Editions, Inc., 1979), hlm. 238).

iklan bahkan tidak hanya hadir sebagai “jeda komersial”, tetapi juga muncul sebagai “susupan” dalam tayangan dengan beragam formatnya (hlm. 242). Dengan demikian, sebagai ruang publik, televisi juga berubah menjadi “pasar” tersendiri bagi dunia bisnis (hlm. 235).

Terkait paparan tersebut, pemantauan dan pengawasan atas isi televisi (*media watch*) oleh publik merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana ditulis Utomo dalam artikelnya yang lain “Mempertanyakan Peran Pemantau Media”. Dalam artikel tersebut, Utomo menguraikan bahwa keberadaan Lembaga Pemantau Media (LPM), baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, sebagai manifestasi dari kegelisahan publik terhadap media dan segenap perangkat jurnalistiknya begitu penting untuk meningkatkan mutu dari media dan jurnalisisme itu sendiri (hlm. 257). Masing-masing LPM memiliki fokus pemantauan yang berbeda dengan sasaran literasi yang juga tidak sama (hlm. 258). Namun, keberadaan LPM belum memberi pengaruh atau dampak dalam skala yang luas, di mana dalam hal ini, Utomo mengidentifikasi kurangnya pelibatan publik dalam kerja LPM sebagai salah satu faktor penyebabnya (hlm. 260). Pelibatan publik dalam kerja-kerja pengawasan dan pemantauan media tentu dapat ditingkatkan, salah satunya dengan meningkatkan literasi media. Sementara itu, di sisi lain, literasi media pun akan meningkat dengan adanya *media watch* yang kuat.¹⁴

Terkait hal ini, Joned Suryatmoko dan Kurniawan Adi Saputro memberikan pandangan mereka mengenai persoalan dalam literasi media dalam artikel mereka “Literasi Media dan Pendidikan Rakyat”. Dengan merujuk Paulo Freire, keduanya menyimpulkan bahwa literasi media merupakan pendidikan dengan rakyat sebagai subjek politiknya (hlm. 271) di mana tujuan dari literasi media tidak lain ialah untuk membuat rakyat kembali berdaulat atas dunianya sendiri (hlm. 275). Berkaitan dengan hal tersebut, saya setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Intan Poerwaningtias, dkk¹⁵ bahwa strategi

¹⁴Lihat Intan Poerwaningtias, dkk. *Model-Model Gerakan Literasi Media dan Pemantauan Media di Indonesia*. Yogyakarta: PKMBP dan Yayasan TIFA, 2013.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 63.

penggabungan literasi media dan *media watch* merupakan strategi yang ideal untuk mendorong adanya perubahan dalam industri media di Indonesia. Meskipun perubahan wajah jurnalisme, termasuk di televisi, akan terjadi secara signifikan jika ada perubahan ekonomi politik dimana ekonomi politik kapitalistik masih menentukan wajah umum dari pengelolaan industri media, termasuk televisi, hingga saat ini.

Penutup

Buku berupa kumpulan artikel ini penting dibaca siapa saja yang tertarik dengan kajian media, khususnya kajian mengenai media penyiaran televisi. Dengan gaya yang mengalir tetapi tetap tajam dan kritis, buku ini secara lengkap menyajikan problem-problem utama dalam orde media saat ini. Sayangnya, artikel-artikel yang disajikan dalam buku ini merupakan artikel-artikel pendek yang tidak sepenuhnya dapat menyajikan analisis yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang sedang dikaji. Selain itu, buku ini pun kurang menunjukkan fokus kajian, apakah mengenai industri televisi ataukah literasi media yang merupakan dua hal besar yang dapat menjadi fokus kajian tersendiri. Meski demikian, buku ini sangat baik untuk dijadikan rujukan awal sekaligus dapat menjadi sarana literasi media yang mumpuni bagi publik, para pemirsa, penonton, dan penikmat tayangan-tayangan televisi di Indonesia dimanapun berada.

Daftar Pustaka

Buku

Mattelart, Armand dan Seth Siegelau (eds.). (1979). *Communication and Class Struggle: 1. Capitalism, Imperialism*. New York: I.G. Editions, Inc.

Poerwaningtias, Intan, dkk. (2013). *Model-Model Gerakan Literasi Media dan Pemantauan Media di Indonesia*. Yogyakarta: PKMBP dan Yayasan TIFA.

Rianto, Puji, dkk. (2014). *Kepemilikan dan Intervensi Siaran: Perampasan Hak Publik, Dominasi, dan Bahaya Media di Tangan Segelintir Orang*. Yogyakarta: Yayasan TIFA dan PR2Media.

SK, Ishadi. (2014). *Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Vestergaard, Torben dan Kim Schroder. (1989). *The Language of Advertising*. Oxford: Blackwell,

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

Dhakidae, Daniel. (1991). "The State, The Rise of Capital and The Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesian News Industry", Disertasi Doktorat, Amerika Serikat, Cornell University.

Mochamad Ikhsan Rizal Assalam. (2016). "Independensi Jurnalis dan Konstruksi Jurnalisme Profesional dalam Konteks Pers Industrial di Indonesia Pasca-Orde Baru: Studi Kasus Pemberitaan Pemilu 2014 di *Media Indonesia* dan *Koran Sindo*", Skripsi Sarjana, Indonesia, Universitas Indonesia.

Situs Resmi

National Association for Media Literacy Education (NAMLE), <https://namle.net/publications/media-literacy-definitions/>.